



PENGUJIAN PENERAPAN E-LAKIP DI DAERAH TERPILIH

E-LAKIP APPLICATION TESTING IN SELECTED REGION

Witra Apdhi Yohanitas

Pusat Penelitian dan Pembangunan Sistem Informasi dan Otomasi
Administrasi Negara - Lembaga Administasi Negara
Jl. Veteran No. 10, Jakarta
Email : witra_ay@yahoo.com

Abstract

The testing of e-LAKIP application aims to find the problems that often arise and to provide initial solutions to solve problems that arise during the implementation of e-LAKIP in the area. The development requires listening and paying attention to issues that arise during the implementation of e-performance reports in the past. Then, the problems can be categorized into technical issues and the substantive issues. Therefore, selection of technical problems can be made. In this way, problems can be grouped and quick solutions can be formulated. Findings indicated that the role of organization and bureaucracy are needed since the project planning, implementation, monitoring and evaluation are carried out by the organization itself. Indeed, further improvements for e-LAKIP should be carried out continuously without having to wait for the troubles during the application comes.

Keywords: *e-LAKIP, issues, technical issues, application development, planning, implementation, monitoring, evaluation*

Abstrak

Pengujian penerapan e-LAKIP ini bertujuan untuk menemukan permasalahan yang sering timbul dan memberikan solusi cepat untuk menyelesaikan permasalahan yang muncul selama penerapan e-LAKIP di daerah. Sebagai salah satu pengembangannya perlu mendengarkan dan memperhatikan permasalahan yang muncul selama penerapan e-LAKIP di daerah lalu. Kemudian mengkategorikan menjadi dua permasalahan yaitu permasalahan secara teknis dan permasalahan secara substantif yang kemudian dilakukan pemilihan permasalahan

-
- 1 Naskah diterima pada 29 Agustus 2012, revisi pertama pada 9 Oktober 2012, revisi kedua pada 11 Februari 2013, revisi ketiga pada 25 Maret 2013, disetujui terbit pada 20 April 2013
 - 2 Tulisan ini merupakan bagian kecil dari penelitian yang dilakukan pada tahun 2012 yang berjudul 'Pengembangan Portal Nasional e-LAKIP' oleh Pusat Penelitian dan Pembangunan Sistem Informasi dan Otomasi Administrasi Negara - Lembaga Administasi Negara.



teknis. Dengan begitu permasalahan dapat terlihat secara kelompok dan selanjutnya dapat diberikan solusi cepat untuk menyelesaikan masalah tersebut. Peran serta organisasi dan birokrasi juga dibutuhkan karena perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi kegiatan dilakukan oleh organisasi itu sendiri bukan hanya oleh pembuat laporan saja. Selanjutnya memberikan rekomendasi untuk dapat melakukan pengembangan aplikasi bukan hanya dari permasalahan yang timbul saja tetapi juga kemungkinan pengembangan lebih jauh sehingga akan didapatkan suatu sistem yang utuh, yang tentu saja dilakukan secara bertahap.

Kata kunci: e-LAKIP, Permasalahan, Permasalahan teknis, Pengembangan aplikasi, perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi

A. PENDAHULUAN

Aplikasi penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berbasis Elektronik (e-LAKIP) merupakan sebuah aplikasi komputer berbasis WEB yang dibangun untuk mempermudah penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Yang menjadi dasar kebijakannya adalah kebijakan yang terdapat dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, PERMENPAN Nomor: PER/O9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2010, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Kinerja dan Pelaporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

LAKIP sendiri disusun berdasarkan pencapaian terhadap: sasaran strategik; serta indikator dan target kinerja, Instansi-instansi pemerintah Pusat (Kementerian/Lembaga dan Non Kementerian) maupun Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota), yang kemudian di evaluasi oleh kementerian PAN dan RB. Oleh karena itu diperlukan perencanaan strategik yang tepat yang dilakukan oleh pihak pimpinan instansi.

Perencanaan strategik mengandung: visi, misi, tujuan, sasaran, cara mencapai tujuan dan sasaran yang meliputi kebijaksanaan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan. penyusunan perencanaan strategik memerlukan integrasi diantara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain, agar mampu menjawab tuntutan dinamika dan perkembangan baik lingkungan internal organisasi, maupun lingkungan eksternal (nasional dan global). perencanaan strategik suatu instansi pemerintah harus mencakup: (1) Pernyataan visi, misi, strategi



(kebijakan), dan faktor-faktor kunci keberhasilan organisasi, (2) Rumusan tentang tujuan jangka panjang, sasaran-sasaran tahunan, dan uraian aktivitas organisasi, dan (3) Uraian tentang program-program dan kegiatan-kegiatan, sebagai cara mencapai tujuan jangka panjang dan sasaran-sasaran tahunan tersebut.

Jika ditelusuri kembali, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, disini pemerintah ingin mendorong setiap instansi pemerintah untuk merubah orientasinya dari orientasi *output* ke *outcome* atau sering disebut akuntabilitas kinerja (*performance accountability*). Namun upaya itu belum menunjukkan hasil yang diinginkan meskipun sudah memulai untuk memprioritaskan kepada reformasi birokrasi. Hasil penelitian LAN pada tahun 2006 menunjukkan terdapat kelemahan manajemen dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Hasil Penelitian Bappenas juga menunjukkan bahwa adanya kelemahan manajemen dalam proses penyelenggaraan pemerintah di instansi pusat maupun daerah. Manajemen dianggap sebagai kegiatan tata usaha, administrasi, dan pekerjaan di bagian administrasi, sehingga cenderung menjadi rutinitas tanpa upaya untuk melakukan perubahan-perubahan yang inovatif.

Dalam Inpres 7/1999 tersebut disebutkan bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan alat untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dan LAKIP sendiri merupakan bagian dari sebuah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah yang bertujuan untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya.

Aplikasi e-LAKIP ini telah dibangun oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Informasi dan Otomasi Administrasi Negara (Puslitbang SIOAN) sejak tahun 2009 yang disesuaikan dengan peraturan berlaku. Seiring dengan diterbitkannya PerMenPAN No 29 Tahun 2010, maka aplikasi tersebut harus dibangun ulang agar sesuai dengan peraturan tersebut. Dengan begitu aplikasi yang sebelumnya sempat dibangun sebelumnya tidak dapat digunakan.

Aplikasi e-LAKIP yang ada sekarang merupakan aplikasi yang telah disesuaikan dengan peraturan terbaru dan juga menampung keinginan dari calon pengguna aplikasi ini, karena merekalah yang nantinya akan memanfaatkannya. Oleh karena itu setelah melakukan serangkaian ujicoba skala kecil yang bertujuan untuk melihat apakah aplikasi ini berjalan dengan baik atau tidak, maka untuk menerapkan e-LAKIP tersebut ke beberapa daerah terpilih sebagai ujicoba secara nasional. Pengujian dilakukan dengan memasukkan data yang sesuai, hingga dibuat laporannya.

Dikarenakan aplikasi ini berbasis web, maka dibutuhkan koneksi internet untuk menjalankannya. Asal ada jaringan dan koneksi internet, maka aplikasi bisa berjalan. Demikian juga kolaborasi data (sinkronisasi data), jauh lebih praktis dan mudah jika berbasis web. Sebagian pengguna, menuntut berbasis web karena alasan kemudahan koneksi internet dan jaringan.



Pembangunan aplikasi e-LAKIP bertujuan untuk mempermudah para penyusun LAKIP dalam menyusun laporannya. Dalam aplikasi ini telah dipersiapkan contoh laporan yang dapat digunakan sebagai referensi mereka. Aplikasi ini juga memudahkan mereka mengumpulkan data dari setiap satuan kerja (satker), dan juga bisa digunakan sebagai alat monitoring kinerja instansi dengan syarat setiap satker berperan aktif dalam mengupdate data mereka.

Aplikasi yang dapat mempermudah para penyusun LAKIP tentu saja masih memiliki kelemahan sendiri. Untuk itu masih dibutuhkan pengembangan aplikasi agar semakin unggul dan mudah digunakan. Sebagai langkah untuk pengembangan selanjutnya, maka *feedback* dari pengguna aplikasi sangat dibutuhkan, selain itu kesesuaian fungsi aplikasi dengan fungsi LAKIP itu sendiri harus saling beriringan.

Menurut Indriantoro dan Supomo (1999), penelitian dapat dilihat sebagai proses yang mencakup dua tahap: penemuan masalah dan pemecahan masalah. Dengan mengidentifikasi/menemukan permasalahan penerapan e-LAKIP tersebut maka diharapkan permasalahan tersebut dapat dicarikan solusinya.

Faktor penyebab kegagalan implementasi aplikasi yang ditemukan dilapangan adalah: budaya yang tidak berubah, mental karyawan yang mudah menyerah, cara berpikir yang keliru, sistem dan aturan main diperusahaan yang tidak mendukung, menuntut kesempurnaan saat ini juga, Ingin 100% pas sesuai keinginan, Tidak mau menyesuaikan diri dengan sistem baru.

Oleh karena itu penerapan e-LAKIP melalui sosialisasi diperlukan untuk menekan kegagalan implementasinya, dan menemukan permasalahan dari aplikasi e-LAKIP tersebut yang kemudian akan disempurnakan secara bertahap.

Permasalahan yang dapat muncul selama penerapan e-LAKIP di daerah dapat dikategorikan menjadi dua yaitu permasalahan secara teknis dan permasalahan secara substantif.

Permasalahan secara teknis ini menyangkut permasalahan yang timbul pada aplikasinya. Permasalahan yang dapat dikelompokkan dalam kategori teknis adalah: permasalahan jaringan dan koneksi internet, permasalahan tampilan aplikasi, permasalahan memasukkan data (*data entry*), permasalahan pembuatan draf Laporan. secara substantif menyangkut pemahaman pengguna tentang LAKIP itu sendiri, apakah sudah sesuai dengan peraturan dan format terbaru, apakah sudah ada kesesuaian data antara unit pusat dengan unit dibawahnya.

Dalam penelitian ini yang akan menjadi topik pembahasannya adalah seputar permasalahan teknis yang timbul selama penerapan e-LAKIP di Daerah ini berlangsung, data akan dikelompokkan dan dilihat permasalahan apa yang sering terjadi di masing-masing daerah, lalu selanjutnya memberikan rekomendasi awal untuk pengembangan e-LAKIP berikutnya.

Mengingat perlu dilakukan pengembangan lebih lanjut dari aplikasi e-LAKIP sehingga layak digunakan oleh instansi pemerintah secara nasional, maka perlu merumuskan permasalahannya sebagai berikut:



1. Permasalahan apa saja yang akan muncul selama proses penerapan e-LAKIP dilaksanakan?
2. Merangkai penyebab dari permasalahan yang muncul selama proses penerapan e-LAKIP dengan menggunakan diagram *fishbone*.
3. Rekomendasi pengembangan apa yang dapat diberikan dilakukan untuk pengembangan aplikasi e-LAKIP selanjutnya?

Tujuan dan Manfaat

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa yang menjadi tujuan dari identifikasi permasalahan penerapan e-LAKIP di daerah ini adalah:

1. Menemukan permasalahan yang sering timbul pada saat penerapan e-LAKIP dan mengelompokkannya
2. Memberikan solusi cepat untuk menyelesaikan permasalahan yang muncul selama penerapan e-LAKIP
3. Memberikan rekomendasi untuk perbaikan dan pengembangan aplikasi selanjutnya karena permasalahan muncul berdasarkan dari para pengguna langsung aplikasi e-LAKIP tersebut.

B. KERANGKA TEORI

Aplikasi penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berbasis Elektronik (e-LAKIP) merupakan sebuah aplikasi komputer berbasis WEB yang dibangun untuk mempermudah penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). E-LAKIP dibangun melalui konsep *e-Government* yang saat ini ramai dibicarakan. Salah satu kemanfaatan *e-*

Government adalah memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada para *stakeholder*-nya (masyarakat, kalangan bisnis, dan industri) terutama dalam hal kinerja efektivitas dan efisiensi di berbagai bidang kehidupan bernegara. Hal ini juga terkait dengan tata pengaturan organisasi pemerintahan untuk memperbaiki kualitas pelayanannya tersebut.

Clay G. Wescott (Pejabat Senior Asian Development Bank) ketika mempelajari penerapan *e-Government* di Asia Pasifik mendefinisikannya sebagai berikut: *E-Government* adalah menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (ICT) untuk mempromosikan pemerintahan yang lebih efisien dan penekanan biaya yang efektif, kemudahan fasilitas layanan pemerintah serta memberikan akses informasi terhadap masyarakat umum, dan membuat pemerintahan lebih bertanggung jawab kepada masyarakat.

Secara lebih sederhana, *e-Government* merupakan sistem teknologi informasi yang dikembangkan oleh pemerintah dalam memberikan pilihan kepada masyarakatnya kapan dan dimanapun mereka bisa mendapatkan kemudahan akses informasi dan layanan yang pemerintah berikan kepadanya. Hal ini merupakan salah satu bentuk fungsi pemerintah untuk memberikan alternatif *channel* pilihan melalui teknologi informasi (media internet) ini.

E-Government juga tidak dapat kita pisahkan dengan kemampuan dan kesiapan manajemen dan SDM terutama dari Pemerintah Daerah.

3 Tertuang dalam Buku Referensi Perancangan Pembangunan Teknologi Informasi Pemerintah Daerah (Local e-Gov Grand Desain) pada Bab II



Lembaga Administrasi Negara mengidentifikasi kunci sukses pengembangan *e-Government* Pemerintah Daerah³ bukan hanya pada penggunaan teknologi akan tetapi tergantung juga pada faktor lain, yaitu: kepemimpinan, kesiapan infrastruktur, kesinambungan informasi, kualitas sumber daya manusia (SDM), dan dukungan masyarakat. Jika dilihat lebih luas lagi maka keberhasilan *e-Government* juga bergantung pada organisasi pemerintah tersebut. Pengorganisasian birokrasi yang baik dapat membantu kesuksesan dalam pengembangan *e-Government* instansi pemerintah

Edgar Schein (1985) didasarkan pada pendekatan normatif manajerial berpendapat budaya sebagai salah satu parameter manajer dalam organisasi perusahaan. Schein memandang kebudayaan membuat sebuah organisasi bertahan. Ini berarti bahwa organisasi harus mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan eksternal dalam rangka untuk bertahan hidup dan mengembangkan, dan pada saat yang sama dapat mengintegrasikan metode yang diterapkan dan pola kerja internal dalam organisasi. Bisa dikatakan bahwa seluruh komponen organisasi bertanggungjawab atas apa yang sedang dan akan terjadi dalam mencapai tujuan organisasi.⁴

Max Weber(1922) digambarkan sebagai bapak sosiologi, memiliki pendekatan yang lebih luas bagi organisasi karena meliputi perspektif sosial dan historis. Weber percaya bahwa pemahaman tentang organisasi dan struktur mereka dapat ditemukan dalam konteks historis, dan ia

mengembangkan yang ideal normatif untuk birokrasi, yang tercermin dalam pandangannya misalnya karyawan publik.

Menurut Weber, karyawan publik harus bertindak seolah-olah kepentingan atasan sendiri dan dengan demikian tinggal ditugaskan bagian mana dalam sebuah birokrasi. Menurut Weber, birokrasi adalah: "Sebuah struktur administrasi yang spesifik, yang didasarkan pada otoritas hukum dan *rule oriented*" (Scott, 1998: 48). Dan memiliki karakteristik sebagai berikut:

- Didirikan pembagian kerja antara anggota organisasi
- Sebuah hierarki administrasi
- Sebuah sistem aturan-berorientasi, yang menggambarkan kinerja pekerjaan
- Pemisahan harta pribadi dan hak untuk kantor
- Pemilihan staf sesuai dengan kualifikasi teknis
- Pekerjaan melibatkan karir

Berdasarkan berkarakteristik yang dikemukakan oleh weber tersebut jika dihubungkan dengan kinerja pemerintah maka setiap pegawai yang ada didalam instansi pemerintah harus selalu berorientasi kepada kinerja dan tentu saja harus memenuhi kualifikasi teknis yang tepat agar kinerja pemerintah mulai dari perencanaan sampai ke pelaporan dapat berjalan dengan baik.

Untuk memperlihatkan kinerja yang dilakukan tentu saja dibutuhkan suatu laporan kinerja. Berkaitan dengan pelaporan kinerja, pemerintah telah menerbitkan PP No. 8/2006

4 Terdapat dalam Buku Organizational Theory oleh Jorgen Lagaard dan Mille Bindslev tahun 2006



tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan dimaksud antara lain memuat aturan yang berkaitan dengan pengertian, prinsip-prinsip dan langkah-langkah pelaporan kinerja. Menurut Nurcahyo (2011) Laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD7. Laporan Kinerja adalah laporan yang umumnya disajikan setiap bulan dan mengikuti bentuk yang sudah distandarisasi yang dirancang secara khusus untuk mempermudah manajemen melakukan pengendalian intern. Ciri khas dari sebuah laporan pelaksanaan adalah bahwa laporan pelaksanaan dapat menunjukkan varian antara hasil sesungguhnya dan standar yang dianggarkan serta menunjukkan varian yang signifikan yang perlu diteliti secara seksama.

Dan hal tersebut terkait dengan bagaimana instansi pemerintah melakukan pengaturan terhadap kinerja dari instansinya atau akrab disebut dengan manajemen kinerja, selain itu terkait juga dengan strategi pengaturan dari kinerja yang dilakukan oleh instansi pemerintah yang akrab disebut dengan manajemen strategik.

Menurut definisinya, manajemen kinerja adalah suatu proses strategis dan terpadu yang menunjang keberhasilan organisasi melalui pengembangan performansi SDM. Dalam manajemen kinerja kemampuan SDM sebagai kontributor individu dan bagian dari kelompok dikembangkan melalui proses bersama antara manajer dan individu yang lebih berdasarkan

kesepakatan daripada instruksi. Menurut Hamka manajemen kinerja memberikan pemahaman tentang pengelolaan tingkat pencapaian kebijakan (kinerja kebijakan) sesuai dengan rencana kinerja yang telah ditetapkan.

Manajemen strategik secara sederhana dapat didefinisikan sebagai proses untuk membangun dan melaksanakan rencana untuk mencapai tujuan jangka panjang dengan memperhitungkan variabel-variabel *internal* dan faktor-faktor eksternal (Kinggudu, 1996). Berdasarkan definisi ini, dapat diturunkan beberapa pemahaman tentang manajemen strategik. *Pertama*, manajemen strategik adalah suatu proses, yang didalamnya terdapat beberapa unsur yang membentuk siklus berkesinambungan. Dalam manajemen strategik, hasil dari suatu unsur akan menjadi input atau memberi *feedback* bagi unsur yang lain. *Kedua*, proses menghasilkan suatu rencana (*plan*) atau dengan kata lain dalam manajemen strategik terdapat proses perencanaan. *Ketiga*, manajemen strategik juga meliputi unsur pelaksanaan dan monitoring dari rencana yang sudah disusun. *Keempat*, Dalam manajemen strategik terdapat tujuan jangka panjang yang akan dicapai melalui perencanaan dan pelaksanaan rencana tersebut, dan *kelima*, dalam manajemen strategik, lingkungan internal dan eksternal menjadi pertimbangan utama dalam perumusan rencana dan pelaksanaan rencana.

Kunci dasar dari LAKIP itu sendiri adalah akuntabilitas dan kinerja. Karakteristik *good government* yang diidentifikasi UNDP salah satunya adalah *accountability*



(akuntabilitas) yakni para pembuat keputusan pada unsur *state* dan *private sectors* bertanggung jawab kepada publik dan lembaga-lembaga *stakeholders*. Menurut Mustopadidjaja (2003) akuntabilitas merupakan kewajiban dari individu-individu pengusaha yang dipercaya mengelola sumber sumber daya publik untuk mempertanggungjawabkan berbagai hal menyangkut fiskal, manajerial dan program. Sedangkan kinerja merupakan istilah yang populer di dalam manajemen, yang didefinisikan dengan istilah hasil kerja, prestasi kerja dan *performance*.

Menurut Fattah (1999:19) kinerja atau prestasi kerja (*performance*) diartikan sebagai: "ungkapan kemampuan yang didasari oleh pengetahuan, sikap dan keterampilan dan motivasi dalam menghasilkan sesuatu". Sementara menurut Sedarmayanti (2001:50) bahwa: "Kinerja merupakan terjemahan dari *performance* yang berarti prestasi kerja, pelaksanaan kerja, pencapaian kerja, unjuk kerja atau penampilan kerja". Rahadi (2010) mengungkapkan kinerja adalah penampilan yang melakukan, menggambarkan dan menghasilkan sesuatu hal, baik yang bersifat fisik dan non fisik yang sesuai dengan petunjuk, fungsi dan tugasnya yang didasari oleh pengetahuan, sikap dan keterampilan.

Dapat terlihat bahwa pengetahuan, keterampilan, motivasi dan sikap merupakan faktor pembentuk dari kinerja. Sehingga untuk menyusun LAKIP yang merupakan bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tersebut membutuhkan pengetahuan, keterampilan, motivasi dan sikap yang

tepat agar pertanggungjawaban dari para pembuat keputusan tersebut sesuai dengan tujuannya.

Menurut Mustopadidjaja (2003) SAKIP sendiri pada dasarnya merupakan instrumen pertanggungjawaban yang terdiri dari berbagai indikator dan mekanisme kegiatan pengukuran, penilaian dan pelaporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, serta misi organisasi. Oleh karena itu para pembuat keputusan dituntut harus mampu dan trampil untuk menyalurkan potensi, peluang dan kendala yang akan dihadapi dalam menyusun rencana strategik yang didalamnya mengandung visi dan misi. Semua itu harus dapat dirumuskan dengan baik terlebih dahulu sehingga dapat dipertanggungjawabkan nantinya.

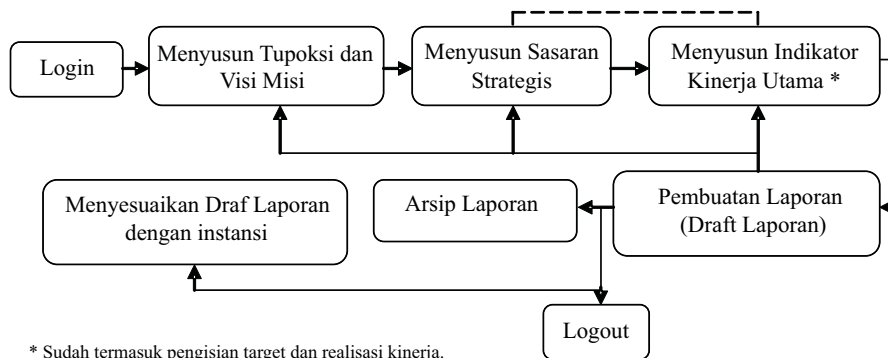
Pengembangan aplikasi E-LAKIP mengarah pada pengembangan aplikasi komputer berbasis WEB, berdasarkan pada parameter-parameter yang terdapat dalam: (1) Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; (2) Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; (3) PERMENPAN Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah; (4) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi



Akuntabilitas Kinerja Tahun 2010; (5) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Kinerja dan Pelaporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Berikut ini adalah alur kerja dari e-LAKIP, yang dilihat dari sisi penyusun laporan akuntabilitas kinerja.



Gambar 1.
Alur Kerja Pengguna e-LAKIP (Penyusun Laporan)⁵

Untuk *administrator* (pengelola aplikasi) e-LAKIP alur kerjanya hampir sama, hanya ada beberapa kemampuan tambahan yaitu: membuat merubah dan menghapus *User ID*, Menambahkan, merubah menghapus data seluruh, mengaktifasikan tahun pelaporan, *memonitoring input* data seluruh *user*. Untuk level pengguna disediakan sampai 2 level. Meskipun begitu aplikasi masih cocok digunakan untuk instansi yang cukup besar seperti lembaga, kementerian dan provinsi. Hanya saja tidak dapat menyajikan semua data dalam satu database saja.

Jika pengisian data kedalam aplikasi dilakukan dengan benar, maka ketika dibuatkan draf laporannya aplikasi langsung menyusun perencanaan kinerja, penetapan

kinerja, dan pengukuran kinerja sehingga mempercepat pembuatan laporan, karena data yang dibutuhkan secara garis besar sama. Langkah selanjutnya adalah menyesuaikan *draft* laporan dengan instansi masing-masing.

C. METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data penelitian didapat dengan tidak mengadakan perhitungan melainkan dengan mendengarkan dan memperhatikan permasalahan yang dapat muncul selama penerapan e-LAKIP di daerah lalu mengkategorikan menjadi dua yaitu permasalahan secara teknis dan permasalahan secara substantif.

⁵ Alur kerja e-LAKIP berdasarkan aplikasi e-LAKIP yang dikembangkan oleh Pusat Pembangunan dan Penelitian Sistem Informasi dan Otomasi Administrasi Negara – Lembaga Administrasi Negara



Dari dua kategori permasalahan tersebut, diambillah permasalahan teknis yang muncul selama kegiatan tersebut berlangsung. Permasalahan tersebut dikelompokkan menjadi beberapa kelompok. Permasalahan jaringan dan koneksi internet, permasalahan tampilan aplikasi, permasalahan memasukkan data (*data entry*), Permasalahan pembuatan draft Laporan. pengelompokan

Permasalahan yang muncul selama kegiatan berlangsung akan dikelompokkan menjadi 4 (empat) kelompok permasalahan teknis diatas, lalu diberikan solusi cepat agar para peserta kegiatan tetap dapat mengikuti kegiatan, kemudian selanjutnya akan menjadi pertimbangan untuk pengembangan aplikasi berikutnya.

Lokus Penerapan

Penerapan e-LAKIP membutuhkan pengujian lebih lanjut untuk menguji keandalannya. Oleh karena itu dipilahkah beberapa instansi terpilih untuk dilakukan pengujian penerapan e-LAKIP. Instansi yang dipilih merupakan instansi daerah yang memiliki nilai rendah atau bahkan belum memiliki LAKIP pada tahun sebelumnya.

Sebagai bahan pertimbangan daerah mana saja yang dipilih untuk dilakukan pengujian, maka digunakanlah hasil evaluasi kinerja pemerintah Provinsi tahun 2011 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (KemenPAN dan RB) seperti terlihat dalam tabel berikut.

Tabel.1 Hasil Evaluasi Kinerja Pemerintah Provinsi Tahun 2011

PROVINSI	KRITERIA
Jawa Tengah	B
Kalimantan Timur	B
Jumlah	2
Bali	CC
DI Yogyakarta	CC
DKI Jakarta	CC
Jawa Barat	CC
Jawa Timur	CC
Kalimantan Barat	CC
Kalimantan Selatan	CC
Kepulauan Riau	CC
Maluku	CC
Nusa Tenggara Barat	CC
Nusa Tenggara Timur	CC
Riau	CC
Sumatera Utara	CC
Sumatera Barat	CC
Sulawesi Utara	CC

Sumatera Selatan	CC
Sulawesi Tengah	CC
Jumlah	17
Aceh	C
Banten	C
Bengkulu	C
Gorontalo	C
Jambi	C
Kalimantan Tengah	C
Kepulauan Bangka Belitung	C
Lampung	C
Papua	C
Sulawesi Barat	C
Sulawesi Selatan	C
Jumlah	11
Rata Rata	C

* Provinsi yang tidak ada kedalam daftar tidak membuat LAKIP tahun 2011

** Sumber. Situs Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (www.menpan.go.id)

Instansi terpilih yang menjadi lokus kegiatan ini adalah sebagai berikut: Kepulauan Riau (Kota Batam), Provinsi Kalimantan Tengah (Palangkaraya), Provinsi NTB

(Mataram), Provinsi Sulawesi Tenggara (Kendari), Provinsi Bangka Belitung (Bangka). Selain itu ada juga BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kalimantan Tengah, dan Kabupaten



Bangka Tengah (Koba) yang menjadi tambahan karena langsung datang menemui tim untuk minta dilakukan kegiatan serupa saat berada di Kalimantan Tengah Dan Bangka Belitung.

Berdasarkan tabel diatas dapat terlihat Kepulauan Riau, Nusa Tenggara Barat memperoleh nilai CC, Kalimantan Tengah, Bangka Belitung memperoleh nilai C. Sedangkan Sulawesi Tenggara tidak mendapat nilai sama sekali, karena tidak mengirimkan LAKIP. Atas dasar inilah daerah daerah tersebut dipilih untuk menguji penerapan aplikasi e-LAKIP tersebut.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data data dilakukan melalui observasi langsung yaitu dengan mengumpulkan keluhan keluhan yang ada dilapangan melalui bimbingan teknis dan asistensi, lalu keluhan/ permasalahan tersebut dikelompokkan dalam kategori yang telah ditentukan. Penelitian ini dilakukan dengan menampung keluhan keluhan yang ada di lapangan yang kemudian dikelompokkan untuk menjadi dasar perbaikan dan pengembangan aplikasi e-LAKIP selanjutnya. Dengan begitu penelitian observasi langsung merupakan pilihan paling tepat untuk melakukan penelitian ini karena dapat melakukan pengamatan tanpa alat dan pengamatan terhadap gejala keadaan yang sebenarnya.

Dari tiap daerah yang menjadi tempat kegiatan berlangsung ditetapkan penyusun LAKIP yang diundang untuk mengikuti kegiatan penerapan e-LAKIP ada 20 (dua puluh) orang tiap daerah, dengan jumlah

peserta tersebut diharapkan kegiatan ini berjalan lebih efektif. Para peserta merupakan perwakilan dari beberapa SKPD yang ada pada tiap daerah yang diharapkan nantinya dapat mengajarkan kepada SKPD lain yang belum berkesempatan mengikuti kegiatan ini.

Khusus di Kalimantan Tengah peserta kegiatan berjumlah 40 (empat puluh) orang, alasannya adalah keinginan Setda (Sekretaris Daerah) provinsi agar seluruh SKPD untuk mengikuti kegiatan tersebut. Pada BPN Kalimantan Tengah berjumlah 30 (tiga puluh) orang dan di Bangka Tengah berjumlah 30 (tiga puluh) orang, alasannya adalah keinginan pimpinan instansi dan juga karena mereka yang meminta langsung saat tim berada di daerah tersebut.

Metode Analisis Data

Metode yang digunakan untuk menganalisa permasalahan penerapan e-LAKIP adalah dengan memfokuskan perhatian pada isu-isu penting melalui pembuatan ranking bertahap, masalah atau penyebab dari masalah dalam bentuk yang lebih signifikan. Metode ini merupakan salah satu keunggulan dari diagram Pareto.

Menurut Vincent Gaspersz, Diagram Pareto adalah grafik batang yang menunjukkan masalah berdasarkan urutan banyaknya kejadian. Masalah yang paling banyak terjadi ditunjukkan oleh grafik batang pertama yang tertinggi serta ditempatkan pada sisi paling kiri dan seterusnya, sampai masalah yang paling sedikit terjadi ditunjukkan oleh batang terakhir yang terendah serta ditempatkan pada sisi paling kanan. Berdasarkan itu maka akan terlihat



permasalahan terbesar yang harus ditangani dan diselesaikan.

Setelah permasalahan tiap daerah terlihat maka langkah selanjutnya yang dilakukan adalah memberikan solusi tercepat untuk menangani permasalahan saat itu juga. Sebelum itu maka perlu di ketahui juga penyebab dari permasalahan yang mengakibatkan hal itu terjadi. Oleh karena itu dengan menggunakan diagram sebab akibat (fishbone) penyebab dari permasalahan dapat terlihat, dan dapat membantu dalam penyelidikan dan pencarian fakta lebih lanjut.

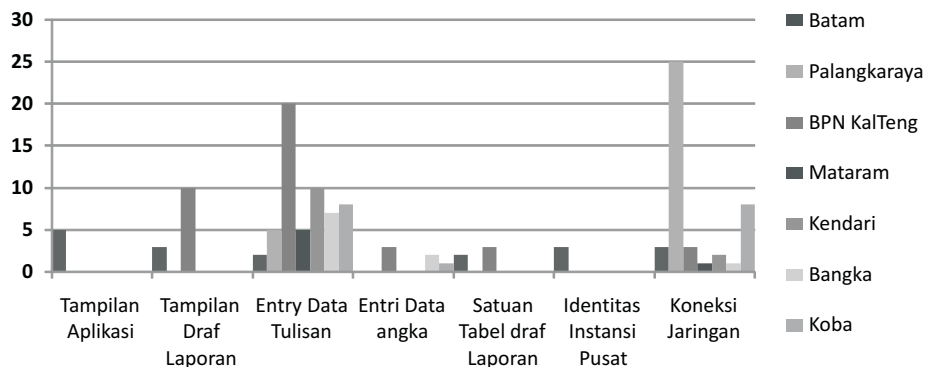
Menurut Vincent Gaspersz, diagram sebab akibat adalah suatu diagram yang menunjukkan hubungan antara sebab dan akibat. Berkaitan dengan pengendalian proses statistikal, diagram sebab akibat dipergunakan untuk menunjukkan faktor faktor penyebab (sebab) dan karakteristik kualitas (akibat) yang disebabkan oleh

faktor faktor penyebab itu.

Diagram sebab akibat sering juga disebut dengan diagram tulang ikan (*fishbone diagram*) karena bentuknya seperti kerangka ikan, atau diagram Ishikawa (*Ishikawa's Diagram*) karena pertama kali diperkenalkan oleh Prof Kaoru Ishikawa dari Universitas Tokyo pada tahun 1953.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Permasalahan yang didapatkan pada tiap daerah akan dikelompokkan menjadi 5 (lima) daerah lokus kegiatan. Dengan mempertimbangkan 2 (dua) tempat tambahan dikelompokkan kedalam provinsi masing masing. Dari kelompok daerah tersebut didapatkan kelompok kelompok permasalahan yang kemudian diolah dengan menggunakan diagram pareto dan diagram sebab akibat (*fishbone*). Berikut ini grafik yang dihasilkan dari pengolahan data tersebut.



Gambar 2.

Grafik Permasalahan Pengujian Penerapan e-LAKIP Pada Instansi Terpilih

Pada gambar grafik diatas dapat terlihat bahwa permasalahan *entry data* dan koneksi jaringan terjadi pada setiap instansi daerah yang terpilih. Ini menunjukkan bahwa permasalahan

tersebut akan terus muncul dan harus segera diselesaikan. Sedangkan permasalahan yang lain tidak terlalu dipermasalahan. Pada saat kegiatan pengujian penerapan e-LAKIP telah



diberikan solusi cepat agar proses pengujian penerapan e-LAKIP dapat berlangsung. Selain itu ada juga yang tidak bisa langsung diberikat solusi dan hanya bisa diselesaikan dengan

melakukan pengembangan dari aplikasi e-LAKIP tersebut. Permasalahan yang terjadi tersebut dapat dijelaskan dalam tabel berikut.

Tabel 2. Permasalahan Pengujian Penerapan e-LAKIP

No	Jenis Permasalahan	Penyebab Permasalahan	Solusi Permasalahan
1	Tampilan aplikasi	Dari aplikasi tidak memungkinkan merubah tampilan	Tidak ada solusi cepat. Dilakukan pengembangan aplikasi untuk mengizinkan perubahan tampilan aplikasi
2	Tampilan draf laporan	Di beberapa bagian dari draf laporan terdapat nama instansi LAN	Dilakukan perubahan langsung ke dalam draf laporan karena draf dihasilkan dalam format <i>word</i> Dilakukan pengembangan agar draf lebih fleksibel.
3	Entri data tulisan	Melakukan penyalinan data dari berkas lain dan tidak mengetik langsung Aplikasi tidak menerima beberapa tanda pointer dan tab	Melakukan pengetikan secara langsung ke dalam aplikasi Menghapus tanda pointer, tab Dilakukan pengembangan aplikasi agar bisa membaca tanda tersebut.
4	Entri data angka	Menggunakan tanda koma (,) untuk menandakan desimal	Mengganti tanda koma dengan titik (.)
5	Satuan Tabel rencana dan realisasi Draft laporan	Satuan tabel tersebut tidak dimasukkan kedalam pemrograman aplikasi	Ditambahkan kolom baru untuk memasukkan satuannya. Dilakukan pengembangan aplikasi dengan memprogram satuan tersebut
6	Identitas instansi pusat	Instansi pusat yang tertera adalah Lembaga Administrasi Negara	Dilakukan perubahan secara manual. Dilakukan pengembangan aplikasi dengan menginisialkan nama instansi pusat
7	Koneksi jaringan	Jaringan terputus, kelebihan penggunaan, dan koneksi lambat.	Menggunakan modem tambahan/ menggunakan aplikasi secara <i>offline</i> Setiap instansi meningkatkan kapasitas jaringan internet dan mengatur penggunaannya.

Selain permasalahan diatas masih ada permasalahan lain yang ditemukan selama menyusun draf LAKIP instansi dan SKPD nya yang perlu diketahui instansi terpilih tersebut yakni:

1. Tidak sejalan nya Sasaran strategik, indikator kinerja dengan visi misi dan tupoksi organisasi maupun SKPD-nya

2. Tidak sejalan nya Seluruh komponen LAKIP instansi bawah dalam hal ini SKPD dengan komponen LAKIP instansi pusat dikarenakan tidak ada koordinasi antara pusat dan SKPD untuk menetapkan komponen komponen tersebut terlebih dahulu.

Untuk permasalahan tersebut sebelum penyusunan LAKIP harus

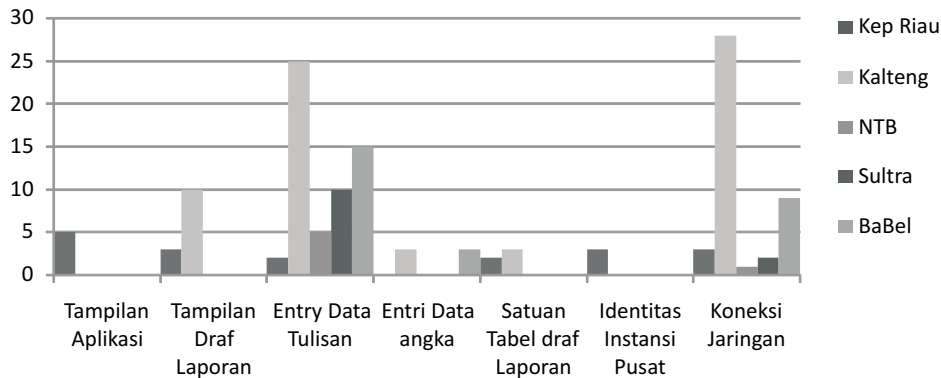


terlebih dahulu melakukan langkah - langkah sebagai berikut:

1. Meninjau kembali sasaran strategik, indikator kinerja dengan visi misi dan tupoksi organisasi.
2. Seluruh komponen LAKIP instansi bawah dalam hal ini SKPD, harus sejalan dengan komponen LAKIP instansi pusat.
3. Perlu koordinasi lebih baik untuk menetapkan komponen komponen LAKIP oleh para pembuat kebijakan.

Hal ini terdengar sangat mudah dilakukan akan tetapi pada kenyataannya dikarenakan hal tersebut tidak dilakukan maka laporan tersebut terlihat hanya sekedar laporan, padahal LAKIP bisa dijadikan sebagai bentuk pertanggungjawaban dan transparansi pemerintah kepada publik.

Dengan tetap merujuk pada tabel 2, selanjutnya instansi daerah itu dibagi berdasarkan keberadaannya (provinsi). Maka grafik yang dihasilkan tertuang dalam gambar 3.



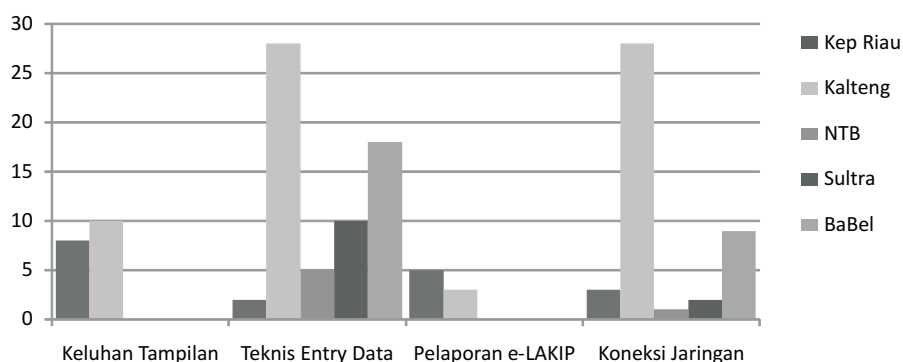
Gambar 3.

Grafik Permasalahan Pengujian Penerapan e-LAKIP Pengelompokan Provinsi

Gambar grafik diatas dihasilkan dengan cara menyatukan permasalahan yang terjadi pada instansi yang berada pada provinsi yang sama yaitu kota palangkaraya dengan BPN Kalteng yang berada di Provinsi Kalimantan Tengah, dan juga kota Bangka dan Kota Koba yang berada di Provinsi Bangka Belitung. Disini makin terlihat permasalahan yang timbul selama pengujian penerapan di daerah berlangsung.

Dari pengelompokkan berdasarkan provinsi dilanjutkan dengan mengelompokkan permasalahan penerapan e-LAKIP

berdasarkan permasalahan teknisnya. Disini permasalahan tampilan aplikasi disatukan dengan tampilan draf laporan yang tergabung dalam permasalahan keluhan tampilan. Entri data tulisan dan entri data angka dikelompokkan menjadi permasalahan teknis entri data. Selanjutnya permasalahan satuan tabel pada draf laporan dan identitas instansi pusat dikelompokkan menjadi permasalahan teknis pelaporan e-LAKIP. Hasil pengelompokkan berdasarkan permasalahan dan provinsi dapat terlihat pada gambar berikut.



Gambar 4.
 Grafik Permasalahan Pengujian Penerapan e-LAKIP
 Pengelompokkan Permasalahan dan Provinsi

Dapat terlihat terdapat dua kelompok permasalahan yang selalu terjadi disetiap daerah. Jika permasalahan tersebut diperlihatkan penyelesaiannya maka akan terlihat seperti tabel berikut.

Tabel 3.
 Permasalahan Pengujian Penerapan e-LAKIP setelah dikelompokkan

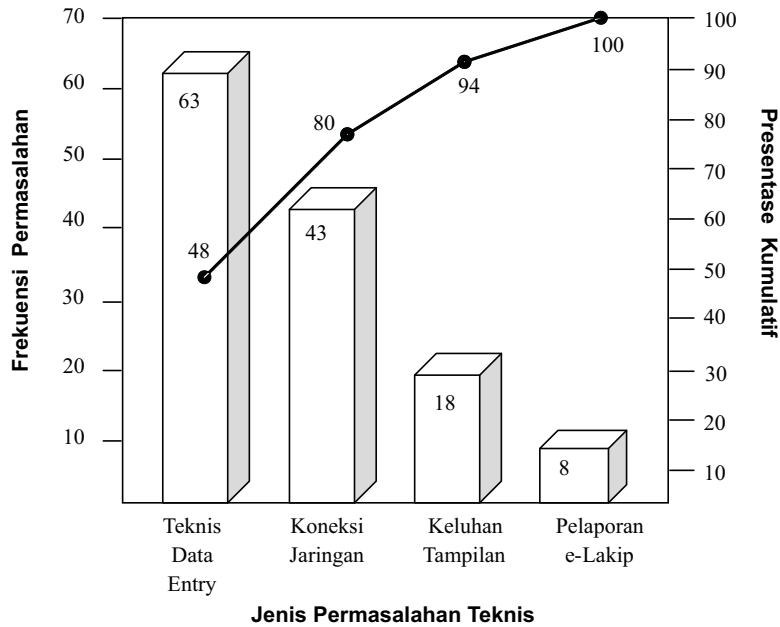
No	Kelompok Permasalahan	Penyebab Permasalahan	Solusi Permasalahan
1	Keluhan Tampilan	Tidak memungkinkan merubah tampilan aplikasi Di beberapa bagian dari draf laporan terdapat nama instansi LAN	Tidak ada solusi cepat dari tampilan aplikasi. Dilakukan perubahan langsung ke dalam draf laporan karena draf dihasilkan dalam format word Dilakukan pengembangan agar tampilan aplikasi dan tampilan draf lebih fleksibel.
2	Teknis entri data	Melakukan penyalinan data dari berkas lain dan tidak mengetik langsung Aplikasi tidak menerima beberapa tanda pointer dan tab. Menggunakan tanda koma (,) untuk menandakan desimal	Melakukan pengetikan secara langsung ke dalam aplikasi Menghapus tanda pointer, tab Dilakukan pengembangan aplikasi agar bisa membaca tanda tersebut. Mengganti tanda koma dengan titik (.)
3	Pelaporan e-LAKIP	Satuan tabel tersebut tidak dimasukkan kedalam pemrograman aplikasi Instansi pusat yang tertera adalah Lembaga Administrasi Negara	Ditambahkan kolom baru untuk memasukkan satuannya. Dilakukan perubahan secara manual. Dilakukan pengembangan aplikasi
4	Koneksi jaringan	Jaringan terputus, kelebihan penggunaan, dan koneksi lambat.	Menggunakan modem tambahan/ menggunakan aplikasi secara offline



No	Kelompok Permasalahan	Penyebab Permasalahan	Solusi Permasalahan
			Setiap instansi meningkatkan kapasitas jaringan internet dan mengatur penggunaannya.

Berdasarkan keterangan diatas maka langkah selanjutnya adalah menggabungkan seluruh permasalahan

pada provinsi menjadi satu dan diolah kedalam diagram pareto.

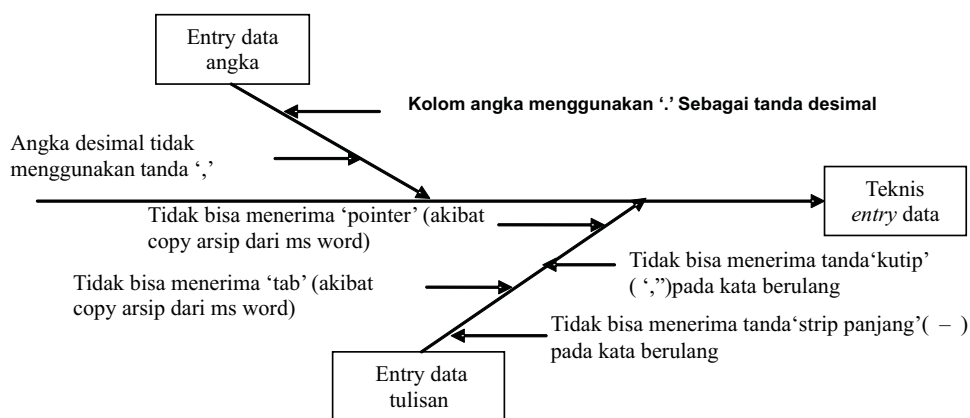


Gambar 5.

Diagram Pareto Permasalahan Teknis Penerapan e-LAKIP

Berdasarkan diagram Pareto jenis permasalahan diurutkan dari permasalahan terbanyak menuju permasalahan paling sedikit. Pada gambar 5 terlihat permasalahan teknis data *entry* menjadi permasalahan terbesar yang terjadi selama kegiatan penerapan e-LAKIP, lalu diikuti oleh permasalahan koneksi jaringan, keluhan tampilan kemudian pelaporan

e-LAKIP. Dengan demikian permasalahan paling kritis yang harus segera diselesaikan adalah teknis *entry* data. Melalui diagram sebab akibat maka permasalahan teknis data *entry* dapat terlihat dalam gambar berikut.



Gambar 6.
Diagram Sebab Akibat Permasalahan Teknis Entri Data

Dari gambar diagram diatas dapat terlihat jelas penyebab dari permasalahan teknis data entri adalah sebagai berikut:

1. Angka desimal tidak menggunakan tanda \',\'
2. Kolom angka menggunakan \',\' sebagai tanda desimal
3. Tidak bisa menerima 'tab' (akibat copy arsip dari ms word)
4. Tidak bisa menerima 'pointer' (akibat copy arsip dari ms word)
5. Tidak bisa menerima tanda 'strip panjang' (-) pada kata berulang
6. Tidak bisa menerima tanda 'kutip' (\',\') pada kata berulang

Permasalahan ini timbul lebih disebabkan karena pada saat memasukkan data pada kolom kolom yang tersedia pada aplikasi hanya dengan mengcopy data langsung dalam ms word. Dari data yang dimasukkan tersebut terdapat berapa karakter (tulisan) yang tidak dapat dibaca pada penyortiran *charset* database aplikasi. Oleh karena itu disarankan untuk melakukan pengetikan secara langsung atau menghapus komponen yang menyebabkan permasalahan itu. Hal ini

juga dapat diperbaiki dengan menyisipkan modul tertentu pada tiap kolom yang dibutuhkan. Modul ini harus memiliki fungsi sama dengan MS word, atau melakukan perbaikan pada database aplikasi. Selain itu, dapat mengganti penyortiran data *charset* pada database aplikasi yaitu menggantikan penyortiran yang sebelumnya menggunakan "latin1_" menjadi "utf8_" karena *charset* utf8_ lebih banyak dan lengkap mengandung kode karakter (tulisan).

Permasalahan koneksi jaringan ini lebih disebabkan oleh sambungan *provider* yang tidak mencapai tempat kegiatan atau terputus, dan tidak terkait langsung dengan substansi dari aplikasinya sendiri. Secara cepat dapat diselesaikan dengan cara menggunakan modem sendiri dari para peserta, jalan keluar lain adalah dengan menggunakan aplikasi secara offline, akan tetapi kelemahannya tidak dapat melihat hasil secara instansi pusat. Diharapkan di tiap instansi memperkuat jaringan internet untuk kelancaran penggunaan e-LAKIP.

Permasalahan tampilan aplikasi yang dapat dilakukan dengan



membicarakan secara serius dengan *developer* agar tampilannya bisa lebih fleksibel dan bisa disesuaikan dengan keinginan pengguna.

Permasalahan pelaporan bisa diselesaikan sendiri dengan cara mengubah *draft* laporan yang dihasilkan secara manual yaitu menambahkan tabel, satuan, atau apapun yang diperlukan, termasuk mengubah nama instansi pusat oleh pengelola aplikasi instansi bisa dilakukan secara manual karena draf dihasilkan dalam bentuk *Ms Word*. Langkah lanjutannya adalah membicarakan dengan *developer* untuk menambahkan kemampuan aplikasi sesuai dengan yang diperlukan, dan memperbaiki database aplikasi e-LAKIP.

Selain dari permasalahan tersebut terdapat juga permasalahan yang berhubungan dengan instansi pemerintahan itu sendiri seperti telah dikemukakan sebelumnya yaitu penyusunan visi misi tupoksi yang tidak sejalan dengan instansi pusat yang dikarenakan tidak adanya koordinasi dari para pimpinan. Selain itu ada juga yang disebabkan mutasi pegawai, karena setiap pegawai yang dimutasikan tersebut tidak sempat menurunkan pengetahuannya, dalam hal ini adalah penyusun LAKIP. Para penyusun LAKIP terkadang juga dituntut untuk membuat sasaran strategik, indikator kinerja, dan yang lainnya hanya berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan oleh instansi. Padahal seharusnya kegiatan instansi yang harus mengacu pada hal-hal tersebut sehingga akuntabilitas kinerja instansi dapat terlihat dengan baik.

Untuk pengembangan selanjutnya, ada baiknya ditambahkan

beberapa pengembangan aplikasi agar bukan saja sebatas pembuatan laporan saja akan tetapi dapat digunakan sebagai alat monitoring para pimpinan atas kinerja instansinya. Selain itu dapat dibuatkan wadah agar tim penilai dapat melakukan evaluasi LAKIP tersebut secara cepat juga. Untuk itu ada beberapa hal yang dapat dilakukan, diantaranya adalah:

- a. Menambahkan konten untuk rekam perbandingan kinerja per kuartal sebagai langkah monitoring.
- b. Menambahkan konten untuk mengevaluasi kinerja instansi per lima tahun.
- c. Menambahkan konten untuk tandatangan digital yang tentu saja berkaitan dengan sandi.
- d. Menambahkan kemampuan level pengguna agar nantinya bisa dalam satu database

E. PENUTUP

Kesimpulan

Permasalahan teknis yang sering muncul selama kegiatan penerapan e-LAKIP di daerah terpilih adalah 1) Permasalahan teknis entri data, 2) Permasalahan koneksi jaringan internet, 3) Permasalahan tampilan aplikasi, 4) Permasalahan draf pelaporan

Selama kegiatan berlangsung beberapa permasalahan dapat dicarikan solusi cepat yang membuat kegiatan dapat berjalan sesuai dengan rencana, dan peserta dapat memahami teknis penggunaan aplikasi untuk melancarkan tugas mereka. Disamping itu diperlukan juga melakukan pembicaraan dengan pihak *developer* untuk dapat menyempurnakan aplikasi untuk kepuasan pengguna aplikasi. Beberapa solusi cepat yang dapat



dilakukan jika permasalahan tersebut tetap muncul adalah 1) Melakukan pengetikan secara langsung atau menghapus komponen yang menyebabkan permasalahan teknis entri data; 2) Menggunakan modem sendiri dari para peserta atau menggunakan aplikasi secara *offline*; 3) Mengubah draf laporan yang dihasilkan secara manual yaitu menambahkan tabel, satuan, atau apapun yang diperlukan, termasuk mengubah nama instansi pusat

Organisasi pemerintah terutama pembuat kebijakan harus lebih peduli tentang akuntabilitas kinerja instansinya sehingga para pembuat laporan tidak merasa kebingungan untuk menyusun laporan kinerja instansi. Koordinasi yang baik sangat dibutuhkan untuk menjadikan laporan akuntabilitas ini bukan hanya jadi sebuah laporan saja, akan tetapi laporan ini bisa menjadi sebuah cerminan dari kinerja instansi pemerintah yang dapat dipertanggungjawabkan secara transparan.

Oleh karena itu instansi pusat harus lebih berkoordinasi dengan instansi dibawahnya dalam hal ini ke tiap SKPD, karena jika koordinasi berjalan baik dan data kinerja selalu diupdate pertahun berjalan, tidak tertutup kemungkinan e-LAKIP bisa menjadi sarana monitoring para pembuat kepentingan terhadap instansi yang dipimpinya

Saran/ Rekomendasi

Berdasarkan penjabaran diatas maka saran/ rekomendasi yang dapat diberikan dari kegiatan ini adalah melakukan perbaikan pada aplikasi dan databasenya untuk menyelesaikan permasalahan dengan cara mengganti

penyortiran data pada database aplikasi yaitu menggantikan penyortiran yang sebelumnya menggunakan "*latin1_*" menjadi "*utf8_*". Pengembangan e-LAKIP selanjutnya diarahkan untuk menjadi sebuah aplikasi perencanaan, monitoring dan evaluasi kinerja pemerintah secara utuh. Dan tentu saja harus dilakukan secara bertahap antara lain menambahkan konten untuk rekam perbandingan kinerja per kuartal sebagai langkah monitoring, menambahkan konten untuk mengevaluasi kinerja instansi per lima tahun, menambahkan konten untuk tandatangan digital yang tentu saja berkaitan dengan sandi, menambahkan kemampuan level pengguna agar nantinya bisa dalam satu *database*. Setiap instansi yang akan menggunakan aplikasi e-LAKIP memiliki jaringan internet untuk mengakses aplikasi secara online dan mempersiapkan berkas yang diperlukan untuk mengisi data yang diperlukan serta melakukan pembicaraan langsung dengan pihak developer untuk mengupgrade aplikasi dan memperbaiki kesalahan yang ada dalam aplikasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Aplikasi Berbasis Web atau Desktop?, Tersedia online (<http://goongbusiness.com/in/article-bebas/194-aplikasi-berbasis-web-atau-desktop-.html> , diakses 29 Juni 2012)
- Asropi. 2007. Manajemen Strategik, Instrumen Peningkatan kinerja Lembaga Pelayanan Publik di Daerah. Manajemen Pembangunan. No. 58/II/Tahun XVI



- Definisi dan Manfaat Utama E-Government 2007. Tersedia online (<http://rifaiza.wordpress.com/2007/08/15/definisi-dan-manfaat-utama-e-government/>), diakses 3 Juli 2012)
- E-Government Concept In Indonesia: Menuju Pemerintahan Yang Transparan, Bersih, dan Berwibawa. Tersedia online (<http://www.goechi.com/egovernment.html>), diakses 3 Juli 2012)
- Fattah, Nanang. 1999. Landasan Manajemen. Bandung: Rosda Karya
- Fredy, Dendi. 5 Mei 2010. Faktor Kegagalan Implementasi Software. Tersedia online (<http://dendyfreddy.wordpress.com/2010/05/05/faktor-kegagalan-implementasi-software/#more-188>), diakses 4 Juli 2012)
- Gaspersz, Vincent. 1998. *Statistical Process Control*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta
- Hamka. 2005. Manajemen Strategik dan Manajemen Kinerja Pada Sektor Publik. *Jurnal Administrasi Publik* 1(4): 175-187
- Hasil Evaluasi Kinerja Pemerintah Provinsi tahun 2011. Tersedia online (http://www.menpan.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=116:hasil-evaluasi-akip-prov-2011&catid=44:akuntabilitas&Itemid=95), di akses 14 September 2012)
- Indriantoro, N dan B. Supomo. 1999. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Bisnis*. Yogyakarta: BPF. E.
- Lagard, Binslev. 2006. *Organizational Theory*. Ventus Publishing ApS. Denmark
- Lembaga Administrasi Negara. 2009. *Advokasi dan Instalasi software sistem laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SILAKIP)*. Lembaga Administrasi Negara. Jakarta
- Lembaga Administrasi Negara. 2009. *Buku Referensi Perancangan Pembangunan Teknologi Informasi Pemerintah Daerah (Local e-Gov Grand Desain)*. Lembaga Administrasi Negara. Jakarta
- Lembaga Administrasi Negara. 2009. *Modul - Modul Manajemen Kinerja*. Lembaga Administrasi Negara. Jakarta
- Lembaga Administrasi Negara. 2011. *Diseminasi e-LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Berbasis Elektronik)*. Lembaga Administrasi Negara. Jakarta
- Manajemen Kinerja: Menuju Keunggulan Organisasi Berkinerja Tinggi Reformasi Birokrasi DJA - 31 Maret 2008. Tersedia online (<http://www.anggaran.depkeu.go.id/web-print-list.asp?ContentId=373>), diakses 4 Juli 2012)
- Mustopadidjaja AR. 2003. *Manajemen Proses Kebijakan Publik*. Jakarta: LAN- Duta Pertiwi Foundation
- Nurchahyo, 4 Januari 2011. Prinsip Dasar Laporan Kinerja Dan Analisis Varians Pada Anggaran Perusahaan. Tersedia online (<http://paknurchahyo.wordpress.com>)



- s.com/2011/01/04/prinsip-dasar-laporan-kinerja-dan-analisis-variabel-pada-anggaran-perusahaan/*, diakses 4 Juli 2012)
- Rahadi. 2010. *Manajemen Kinerja Sumber Daya Manusia*. Malang: Tunggal Mandiri Publishing
- Sedarmayanti. 2001. *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Bandung: Mandar Maju.
- Soewartoyo, dan Pontas Sinaga. 2007. *Modul Diklat Fungsional Peneliti Tingkat Pertama: Teknik dan Praktek Pengumpulan Data Lapangan*. Jakarta: LIPI

